

Peran UMKM dalam Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Prasejahtera di Kecamatan Cibiru

Rizki Firmansyah¹, Chisa Belinda Harahap²

¹Sosiologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, frizki256@gmail.com

²Sosiologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, chisaharahap@uinsgd.ac.id

Abstrak

Kecamatan Cibiru di timur Kota Bandung mengalami pertumbuhan infrastruktur dan pendidikan, namun masih menghadapi persoalan sosial ekonomi di kalangan masyarakat prasejahtera. Ketimpangan sosial ekonomi dan terbatasnya mobilitas sosial menjadi tantangan utama, meskipun UMKM memiliki potensi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana peran UMKM dapat mendorong mobilitas sosial dan menurunkan tingkat ketimpangan sosial ekonomi di wilayah Kecamatan Cibiru. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, sementara data dikumpulkan melalui observasi langsung serta wawancara mendalam dengan para pelaku UMKM dan masyarakat prasejahtera. Data dianalisis secara tematik untuk menggali pola dan makna sosial yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM berperan sebagai penopang ekonomi lokal, namun perannya belum optimal karena berbagai hambatan struktural, seperti keterbatasan akses modal, pendampingan manajerial, dan lemahnya dukungan kelembagaan. Dalam perspektif teori struktural fungsional, kondisi ini mencerminkan disfungsi sosial akibat tidak berfungsinya institusi ekonomi secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan UMKM yang lebih terarah, berkelanjutan, dan kolaboratif agar mampu mendukung transformasi sosial ekonomi yang adil dan inklusif di Kecamatan Cibiru.

Kata Kunci: Ketimpangan Sosial, Masyarakat Prasejahtera, Mobilitas Sosial, Teori Struktural Fungsional, UMKM

Latar Belakang

Kecamatan Cibiru berada di wilayah timur Kota Bandung, berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung, dengan total luas area kurang lebih 6,32 km². Wilayah ini terdiri dari empat kelurahan yaitu Cipadung, Cisurupan, Palasari, dan Pasir Biru yang masing-masing memiliki karakteristik geografis dan sosial yang beragam. Dengan jumlah penduduk sekitar 78.179 jiwa pada tahun 2024, terdiri dari 39.685 laki-laki dan 38.494 perempuan, Kecamatan Cibiru memiliki kepadatan penduduk sekitar 11.973 jiwa per km². Topografi wilayah ini bervariasi, dengan kombinasi antara dataran tinggi yang sejuk dan area yang lebih landai, menjadikan lingkungan Cibiru relatif asri di beberapa titik meskipun urbanisasi terus berkembang. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, perumahan, dan fasilitas umum meningkat, terutama di sekitar kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang menjadikan Cibiru sebagai kawasan pendidikan sekaligus pemukiman yang berkembang pesat. Secara sosial, masyarakat di Kecamatan Cibiru memiliki latar belakang yang beragam, dengan perpaduan antara kehidupan tradisional khas masyarakat Sunda dan dinamika kehidupan urban. Sebagai kawasan yang berada dalam proses transisi dari pinggiran kota menuju wilayah urban, Cibiru menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk pemerataan fasilitas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (BPS, 2024).

Tabel 1
Data Populasi Penduduk Kecamatan Cibiru

Kelurahan Subdistrict	Penduduk/Population			Kelurahan Subdistrict	Persentase Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk (ribu/ km ²) Population Density (thousand/ km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Population Sex Ratio
	Laki-Laki/Male	Perempuan/Female	Jumlah/Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(5)	(6)	(7)
Pasirbiru	8.637	8.246	16.883	Pasirbiru	21,60	15,35	104,74
Cipadung	11.925	11.576	23.501	Cipadung	30,06	22,38	103,01
Palasari	11.583	11.367	22.950	Palasari	29,36	10,58	101,90
Cisurupan	7.540	7.305	14.845	Cisurupan	18,99	6,72	103,22
Kecamatan Cibiru Cibiru District	39.685	38.494	78.179	Kecamatan Cibiru Cibiru District	100	11,97	103,09

Sumber : BPS (2024)

Kecamatan Cibiru, meskipun tengah berkembang secara infrastruktur dan pendidikan, masih menghadapi berbagai persoalan sosial ekonomi, terutama di kalangan masyarakat prasejahtera. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduknya mencapai 78.179 jiwa dengan kepadatan lebih dari 11.000 jiwa per km² dan sebagian besar penduduknya termasuk dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah yang menggantungkan penghasilan dari sektor informal seperti menjadi buruh, pedagang kecil, maupun pekerja harian lepas (BPS, 2024). Keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan permodalan usaha menjadi faktor yang memperparah kerentanan sosial di wilayah ini. UMKM sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi jalan keluar dari permasalahan tersebut, namun hingga kini belum mampu menjadi solusi yang efektif. Hal ini disebabkan sebagian besar UMKM masih berskala mikro, dikelola secara tradisional, dan minim pendampingan serta akses pasar. Banyak pelaku usaha mengalami kendala dalam hal manajemen keuangan, teknologi, dan modal, sehingga peran UMKM dalam mendorong mobilitas sosial masyarakat prasejahtera belum berjalan optimal (Telkom University, 2023).

Permasalahan ini tidak hanya mencerminkan kesenjangan ekonomi, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang berdampak pada stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Ketika kelompok prasejahtera tidak dapat mengakses sumber daya sosial secara adil, seperti pendidikan, modal usaha, dan pelayanan publik, maka terjadi disfungsi sosial yang berpotensi menimbulkan pengangguran struktural, menurunnya kualitas hidup, hingga marginalisasi. Menurut perspektif teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem sosial yang terdiri dari berbagai subsistem, di mana masing-masing subsistem memiliki peran dan fungsi spesifik dalam menjaga stabilitas serta keteraturan sosial (Sciortino, 2021). UMKM dalam hal ini, dapat dipandang sebagai institusi ekonomi yang idealnya mampu menopang peran keluarga sebagai unit produksi dan konsumsi, serta berkontribusi terhadap integrasi sosial, adaptasi terhadap perubahan, dan pencapaian tujuan ekonomi masyarakat. Namun jika institusi ini tidak berjalan efektif, maka fungsi-fungsi sosial tersebut terganggu dan menyebabkan ketidakseimbangan sistem sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji persoalan ini secara sosiologis guna merumuskan strategi pemberdayaan yang mampu menguatkan struktur sosial lokal dan mendorong transformasi sosial ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi masyarakat prasejahtera di Kecamatan Cibiru adalah ketimpangan sosial ekonomi yang masih tinggi dan terbatasnya peluang untuk

meningkatkan kesejahteraan melalui mobilitas sosial. Dalam konteks ini, UMKM memiliki potensi strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang dapat membuka peluang bagi masyarakat prasejahtera untuk keluar dari kondisi keterbatasan sosial dan ekonomi. Namun, hingga saat ini, peran UMKM dalam mendorong mobilitas sosial dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran UMKM dalam mendorong mobilitas sosial dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di kalangan masyarakat prasejahtera di Kecamatan Cibiru.

Kajian ini bertujuan untuk memahami peran UMKM dalam mendorong mobilitas sosial dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat prasejahtera Kecamatan Cibiru, dengan harapan dapat memberikan kontribusi signifikan secara teoritis, praktis, dan sosial. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman tentang bagaimana institusi ekonomi mikro seperti UMKM berfungsi dalam menjaga keseimbangan sosial berdasarkan perspektif teori struktural fungsional. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan menjadi dasar bagi perumusan strategi pemberdayaan UMKM yang efektif, termasuk peningkatan akses modal, pelatihan manajemen keuangan, dan pendampingan teknis yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Secara sosial, penelitian ini penting untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat prasejahtera melalui pengurangan ketimpangan dan peningkatan integrasi sosial, sehingga menciptakan stabilitas dan keteraturan masyarakat di wilayah Kecamatan Cibiru.

Tinjauan Pustaka

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara luas dianggap sebagai penggerak utama perekonomian nasional, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok prasejahtera dan mendorong mobilitas sosial ekonomi. Di berbagai daerah, UMKM memainkan peran penting dalam membuka peluang kerja, memanfaatkan potensi sumber daya lokal, serta berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi yang masih menjadi persoalan krusial dalam proses pembangunan. Namun, efektivitas peran UMKM tersebut sangat bergantung pada faktor-faktor seperti akses modal, keterampilan pengelolaan usaha, teknologi, dan dukungan institusional (Riska & Nurlaila, 2024). Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai peran UMKM dalam konteks transformasi sosial ekonomi masyarakat prasejahtera, khususnya di wilayah Kecamatan Cibiru, menjadi penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif serta merumuskan strategi pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Indarwati, Tuasalamony, Sahrullah, dan Hatuwe (2023) dengan judul *"Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Namlea Kabupaten Buru"* bertujuan untuk menganalisis kontribusi UMKM terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Penelitian ini berfokus pada pelaku UMKM di Desa Namlea, Kabupaten Buru, dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei lapangan, wawancara, serta dokumentasi. Kerangka teorinya mengacu pada teori pemberdayaan masyarakat dan teori kesejahteraan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup, memperluas akses pasar, memberdayakan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Faktor yang mendukung antara lain adanya dukungan pemerintah dan antusiasme masyarakat, sementara hambatannya meliputi keterbatasan bahan baku, kondisi cuaca, jumlah tenaga kerja yang minim, serta kurangnya keterampilan.

Kedua, penelitian oleh Zuhri, Siregar, Mutiara, Halimah, Naysilla, Andini, Ariani, Agusta, Zuliana, Dari, dan Fitri Hasibuan (2024) yang berjudul *"Peran UMKM dalam Kesejahteraan Negara dan Masyarakat Menuju Indonesia Emas di Desa Tuntungan 2, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara"* bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan negara dan masyarakat, khususnya dalam kerangka visi "Indonesia Emas 2045". Penelitian ini berfokus pada pelaku UMKM serta masyarakat di Desa Tuntungan 2, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara terhadap 20 responden. Teori yang digunakan meliputi teori pembangunan ekonomi dan kewirausahaan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM mampu berkembang meskipun sebagian besar muncul karena dorongan kebutuhan ekonomi. Pemanfaatan teknologi digital dan platform online terbukti signifikan dalam memperluas jangkauan pasar dan mengembangkan usaha. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya akses pembiayaan serta kurangnya infrastruktur yang memadai.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Adnan Husada Putra (2024) dengan judul *"Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora"* bertujuan untuk menganalisis kontribusi UMKM terhadap proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blora. Fokus penelitian ini adalah pelaku UMKM di wilayah tersebut, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka. Teori yang digunakan mencakup teori pembangunan ekonomi dan teori pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, UMKM turut berperan dalam pemerataan hasil pembangunan dan memiliki daya tahan yang kuat terhadap krisis ekonomi. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam memberikan dukungan melalui kebijakan yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM secara berkelanjutan.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut memberikan gambaran penting mengenai peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah dengan pendekatan yang berbeda-beda, mulai dari faktor pendukung dan penghambat, pemanfaatan teknologi digital, hingga kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan ketahanan ekonomi daerah. Namun, yang membedakan penelitian ini dan penelitian terdahulu di atas adalah fokusnya yang lebih spesifik pada konteks masyarakat prasejahtera di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung dengan pendekatan sosiologis yang menitikberatkan pada peran UMKM dalam mendorong mobilitas sosial dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Selain itu, penelitian ini tidak hanya melihat UMKM dari segi ekonomi semata, tetapi juga menelaah bagaimana UMKM sebagai institusi sosial dapat memperkuat struktur sosial lokal dan berkontribusi pada transformasi sosial ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini menggabungkan analisis struktural fungsional untuk memahami keterkaitan antara fungsi UMKM dan keseimbangan sosial, yang belum secara eksplisit dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek ekonomi dan pemberdayaan umum. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam merumuskan strategi pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat prasejahtera di kawasan perkotaan seperti Kecamatan Cibiru.

Untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini, digunakan teori Struktural Fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau struktur-struktur sosial yang saling berkaitan dan memiliki

fungsi masing-masing demi menjaga keteraturan dan stabilitas sosial. Parsons menjelaskan bahwa setiap sistem sosial harus memenuhi empat fungsi pokok yang dikenal dengan skema AGIL, yaitu *Adaptation* (kemampuan menyesuaikan diri dan mengelola sumber daya, dilakukan oleh institusi ekonomi), *Goal Attainment* (penetapan dan pencapaian tujuan bersama, dijalankan oleh sistem politik), *Integration* (menjaga keteraturan dan solidaritas sosial melalui hukum dan norma), serta *Latency* (memelihara nilai dan motivasi kultural, dilakukan oleh keluarga, agama, dan pendidikan). Dalam teori ini, keteraturan sosial bergantung pada konsensus nilai di antara anggota masyarakat, di mana setiap institusi sosial menjalankan fungsinya untuk menjaga keseimbangan sistem secara keseluruhan. Parsons memandang perubahan sosial sebagai proses evolusioner yang bertujuan untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi baru tanpa mengganggu stabilitas sistem. Meskipun memberikan kerangka yang sistematis, teori ini juga dikritik karena terlalu menekankan stabilitas dan keteraturan serta cenderung mengabaikan konflik, ketimpangan, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat (Turama, 2018).

Dalam konsep teori Struktural Fungsional, Talcott Parsons memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau struktur yang saling berinteraksi dan berfungsi secara bersama-sama untuk menjaga stabilitas serta keteraturan sosial. Dalam kerangka ini, setiap institusi sosial, termasuk UMKM, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial secara keseluruhan. UMKM berfungsi sebagai institusi ekonomi yang tidak hanya menopang kelangsungan hidup keluarga dan masyarakat melalui aktivitas produksi dan konsumsi, tetapi juga berperan dalam memperkuat integrasi sosial serta membantu masyarakat beradaptasi terhadap perubahan ekonomi yang terjadi. Tokoh seperti Talcott Parsons menekankan bahwa ketika institusi-institusi sosial menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, maka keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat dapat terwujud. Dalam konteks Kecamatan Cibiru, UMKM dapat dipandang sebagai salah satu institusi yang strategis dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi dan mempererat kohesi sosial di kalangan masyarakat prasejahtera, sehingga peran UMKM tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan masyarakat setempat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran UMKM dalam mendorong mobilitas sosial dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di kalangan masyarakat prasejahtera di Kecamatan Cibiru. Metode studi kasus digunakan untuk menelaah fenomena tersebut dalam konteks wilayah tertentu secara mendalam, yakni di Kecamatan Cibiru. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan observasi langsung serta wawancara mendalam dengan pelaku UMKM dan masyarakat prasejahtera di wilayah tersebut. Wawancara dilakukan secara purposive, dengan memilih informan yang dianggap memiliki pengalaman dan pemahaman yang relevan terhadap isu pemberdayaan UMKM dan kondisi sosial ekonomi setempat. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik guna mengidentifikasi pola, makna, dan keterkaitan antar konsep dalam konteks sosial yang diteliti. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai dinamika sosial ekonomi yang berlangsung di Kecamatan Cibiru.

Hasil Kegiatan

Selama pelaksanaan praktik, kegiatan utama yang peneliti lakukan adalah melakukan wawancara mendalam dengan pelaku UMKM dan masyarakat prasejahtera di Kecamatan Cibiru. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman mereka mengenai peran UMKM dalam kehidupan sosial ekonomi mereka, kendala yang dihadapi, serta harapan mereka terhadap pemberdayaan usaha mikro tersebut. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di beberapa lokasi UMKM untuk melihat secara nyata proses usaha dan interaksi sosial yang terjadi.

Peran peneliti selama penelitian adalah sebagai pengumpul data utama yang secara aktif berinteraksi dengan masyarakat, serta mencatat berbagai cerita dan pengalaman yang mereka bagikan. Pengalaman ini memberikan peneliti wawasan langsung tentang dinamika sosial dan ekonomi di Kecamatan Cibiru, sekaligus memperkaya analisis yang akan dilakukan. Dalam pelaksanaan wawancara dan observasi, ditemukan beberapa temuan penting. Pertama, banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala serius terkait akses modal dan manajemen usaha yang terbatas. Kedua, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait masih dirasa kurang optimal sehingga membatasi potensi pengembangan usaha. Ketiga, masyarakat prasejahtera sangat mengandalkan UMKM sebagai sumber penghasilan utama, namun merasa perlu adanya pendampingan yang lebih intensif agar usaha mereka dapat berkembang dan memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih signifikan.

Tabel 2
Tahapan Kegiatan

Tanggal	Kegiatan	Lokasi	Keterangan
16 Mei 2025	Kordinasi dengan pihak terkait	RW 06 Kec. Cibiru	Bertemu dengan ketua RW 06 Kec. Cibiru
17 Mei 2025	Observasi dan wawancara dengan warga	RW 06 Kec. Cibiru	Warga yang memiliki UMKM
20 Mei 2025	Melihat aktivitas pelaku UMKM	UIN Sunan Gunung Djati	Turun ke lapangan untuk melihat kondisi para pelaku usaha
24 Mei 2025	Bertemu dengan pihak terkait	RW 08 Kec. Cibiru	Bertemu dan meminta izin kepada ketua RW 08 Kec. Cibiru
25 Mei 2025	Wawancara dengan para pelaku usaha	RW 08 Kec. Cibiru	Warga yang memiliki UMKM

Sumber : Peneliti (2025)

Pembahasan

Berdasarkan temuan di lapangan dan data dari Kecamatan Cibiru dalam Angka 2024, dapat diinterpretasikan bahwa kondisi UMKM di Kecamatan Cibiru masih menghadapi berbagai kendala struktural yang signifikan. Meskipun UMKM telah menjalankan peran penting dalam

menyediakan sumber penghidupan bagi masyarakat prasejahtera khususnya melalui usaha rumahan, perdagangan kecil, dan jasa informal, namun peran ini belum cukup kuat untuk mendorong mobilitas sosial secara luas. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya dukungan kelembagaan, seperti minimnya koperasi produktif dan lembaga keuangan yang memadai. Data mencatat hanya terdapat 17 koperasi aktif, yang mayoritas merupakan koperasi konsumsi, dan hanya dua lembaga keuangan formal yang beroperasi di wilayah ini. Kondisi tersebut menggambarkan betapa sulitnya pelaku UMKM mendapatkan akses terhadap modal usaha, pelatihan manajerial, dan dukungan teknis yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang masih menjalankan usahanya secara tradisional, tanpa pendampingan yang memadai. Dengan keterbatasan tersebut, UMKM di Cibiru memang telah membantu menopang ekonomi keluarga dan menyediakan lapangan kerja alternatif, namun belum mampu secara maksimal menjadi sarana mobilitas sosial vertikal yang mampu mengangkat masyarakat dari kondisi prasejahtera menuju kehidupan yang lebih mapan. Temuan ini menunjukkan perlunya strategi pemberdayaan yang lebih terarah dan terstruktur agar potensi UMKM benar-benar bisa dioptimalkan sebagai kekuatan transformasi sosial ekonomi di Kecamatan Cibiru (BPS, 2024).

Jika dikaitkan dengan teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, kondisi UMKM di Kecamatan Cibiru mencerminkan adanya gejala disfungsi sosial dalam sistem masyarakat. Hal ini terlihat dari ketimpangan sosial ekonomi yang masih terjadi, di mana beberapa subsistem sosial, seperti ekonomi dan pemerintah, belum sepenuhnya menjalankan fungsinya secara optimal dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa integrasi antar elemen sosial belum berjalan harmonis, sehingga menghambat tercapainya stabilitas dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Parsons menjelaskan bahwa setiap institusi sosial memiliki fungsi tertentu yang menopang stabilitas dan keteraturan sosial secara keseluruhan. UMKM, sebagai bagian dari subsistem ekonomi, idealnya berperan dalam proses adaptasi masyarakat terhadap kebutuhan ekonomi, pencapaian tujuan hidup layak, integrasi sosial, serta pelestarian nilai-nilai kemandirian dan kerja. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa UMKM di Cibiru belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Minimnya jumlah koperasi produktif, terbatasnya lembaga keuangan, dan lemahnya dukungan pendampingan menjadi faktor-faktor yang menghambat UMKM dalam menjalankan peran strategisnya sebagai institusi penggerak ekonomi masyarakat prasejahtera.

Ketidakefektifan UMKM dalam memenuhi fungsinya tersebut menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem sosial. Parsons menyebut kondisi ini sebagai disfungsi, yaitu ketika salah satu bagian dari sistem tidak bekerja sebagaimana mestinya sehingga mempengaruhi stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks di wilayah Kecamatan Cibiru, disfungsi ini terlihat dari rendahnya mobilitas sosial, serta keterbatasan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi yang layak. UMKM memang masih menjadi tumpuan ekonomi keluarga, namun belum mampu menjadi sarana efektif untuk mengangkat masyarakat dari kondisi prasejahtera menuju kesejahteraan yang lebih mapan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan yang mampu mengaktifkan kembali fungsi-fungsi sosial dari UMKM agar perannya dalam sistem sosial masyarakat dapat berjalan secara utuh dan berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu, situasi UMKM di Kecamatan Cibiru memiliki karakteristik dan tantangan yang cukup berbeda. Penelitian oleh Indarwati, *et al.* (2023) di Desa Namlea menunjukkan bahwa UMKM telah berperan aktif dalam membuka lapangan kerja, menciptakan pasar baru, dan mendorong pembangunan ekonomi lokal, dengan dukungan yang cukup dari pemerintah serta tingginya minat masyarakat. Sementara itu, penelitian oleh Zuhri, *et al.* (2024) menyoroti bahwa UMKM di Desa Tuntungan 2 mulai memanfaatkan teknologi digital dan platform *online* untuk mengembangkan usaha dan memperluas pasar, meskipun masih terkendala akses pembiayaan dan infrastruktur. Di sisi lain, studi oleh Putra (2024) di Kabupaten Blora menegaskan bahwa UMKM secara signifikan menyumbang terhadap PDB dan mampu bertahan dalam situasi krisis, berkat dukungan kebijakan pemerintah daerah yang cukup kuat.

Berbeda dari ketiga lokasi tersebut, hasil penelitian di Kecamatan Cibiru justru menunjukkan bahwa UMKM masih berada dalam tahap perkembangan yang cukup mendasar, dengan sejumlah hambatan yang cukup signifikan. Kondisi ini tercermin dari akses modal yang terbatas, kurangnya pendampingan manajemen, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital. Belum adanya koperasi produksi dan ketiadaan lembaga keuangan lokal yang memadai juga menjadi indikator lemahnya dukungan kelembagaan bagi pertumbuhan UMKM. Keterbatasan ini berimbas pada pengelolaan usaha yang masih sangat tradisional dan kurang produktif, sehingga berpengaruh langsung pada stagnasi sosial ekonomi masyarakat prasejahtera di Kecamatan Cibiru. Masyarakat yang bergantung pada usaha mikro sering kali kesulitan mengembangkan usahanya ke tahap yang lebih berkelanjutan, sehingga peluang mobilitas sosial vertikal pun menjadi sangat terbatas. Ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi ini berpotensi memperlebar jurang sosial antara kelompok prasejahtera dengan kelompok ekonomi yang lebih mapan, sekaligus memperkuat siklus kemiskinan antar generasi.

Selain itu, lemahnya kapasitas kelembagaan dan minimnya akses pada koperasi produksi maupun lembaga keuangan lokal menyebabkan keterbatasan dalam partisipasi ekonomi dan keterlibatan masyarakat dalam struktur sosial yang lebih luas. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat integrasi sosial dan mendorong munculnya masalah sosial seperti keterasingan, ketergantungan ekonomi, bahkan potensi konflik akibat persaingan sumber daya yang sempit. Dalam kerangka teori struktural fungsional, fenomena ini mencerminkan disfungsi institusional yang mengganggu stabilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, penanganan melalui strategi pemberdayaan yang terarah dan kolaboratif sangat penting untuk mencegah memburuknya ketidakmerataan sosial ekonomi dan melemahnya kohesi sosial di Kecamatan Cibiru.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan lapangan dan data dari Kecamatan Cibiru dalam Angka 2024, dapat disimpulkan bahwa keberadaan UMKM di Kecamatan Cibiru memiliki peran penting sebagai penopang ekonomi masyarakat prasejahtera, namun belum mampu menjalankan fungsi strategisnya secara optimal dalam mendorong mobilitas sosial dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. UMKM di wilayah ini masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural, seperti terbatasnya akses permodalan, minimnya pendampingan manajerial, serta lemahnya dukungan kelembagaan berupa koperasi produktif dan lembaga keuangan lokal. Kondisi

tersebut menyebabkan sebagian besar pelaku UMKM tetap berada pada pola usaha tradisional yang kurang produktif, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masih terbatas. Dalam kerangka teori struktural fungsional Talcott Parsons, hal ini menunjukkan adanya disfungsi sosial di mana institusi ekonomi dalam hal ini UMKM belum menjalankan fungsinya secara maksimal dalam menjaga stabilitas dan integrasi sosial masyarakat. Ketidakefektifan sistem ini menciptakan ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi dan memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Dibandingkan dengan wilayah lain yang lebih maju dalam pengelolaan UMKM, Kecamatan Cibiru masih tertinggal dalam hal dukungan kebijakan, pemanfaatan teknologi, serta pembangunan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan UMKM yang lebih terarah, berkelanjutan, dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, serta masyarakat. Upaya ini penting agar UMKM dapat menjalankan perannya secara fungsional dalam sistem sosial sebagai motor penggerak mobilitas sosial dan pendorong integrasi ekonomi yang berkeadilan di tingkat lokal.

Ucapan Terima Kasih

Dalam hal ini, peneliti menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung jalannya penelitian, khususnya kepada masyarakat di wilayah RW 06 dan RW 08 Kecamatan Cibiru selaku pelaku UMKM yang telah bersedia meluangkan waktu, berbagi informasi, serta memberikan dukungan selama proses pengumpulan data. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pihak pemerintah kecamatan dan dinas terkait atas bantuan dalam penyediaan data dan fasilitas yang diperlukan demi kelancaran penelitian ini.

Tidak lupa, peneliti berterima kasih kepada Ibu Chisa Belinda selaku dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cibiru.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2024). Kecamatan Cibiru dalam angka 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung.
- Indarwati, I., Tuasalamony, K., Sahrullah, S., & Hatuwe, R. S. M. (2023). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Namlea Kabupaten Buru. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(4), 931–944. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v9i4.4316>
- Prasetya, A., Nurdin, M. F., & Gunawan, W. (2021). *Sosietas* Jurnal Pendidikan Sosiologi Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal. *Pendidikan Sosiologi*, 11(1), 929–939.
- Putra, A. H. (2018). Peran Umkm Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18162>
-

- Riska, E., & Nurlaila, L. (2024). Peran Umkm Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 1–10.
- Sciortino, G. (2021). A Blueprint for Inclusion: Talcott Parsons, the Societal Community and the Future of Universalistic Solidarities. *The American Sociologist*, 52(2), 159–177. <https://doi.org/10.1007/s12108-020-09470-0>
- Telkom University. (2023). Pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan UMKM di Desa Cibiru Wetan. Telkom University Repository.
- Turama, A. R. (2018). Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. *Jurnal Univeristas Sriwijaya*, 2(2), 58–69.
- Zuhri, M., Siregar, A. S., Mutiara, D., Halimah, R., Naysilla, A., Andini, J., Ariani, W., Agusta, S. A., Zuliana, M. A., Dari, D. U., & Hasibuan, D. H. F. (2024). *Jurnal Transformasi Humaniora*. 7(1), 80–86.